

Skandal Bank Century, Setelah Satu Dekade

Minggu , 22 April 2018 | 20:24

http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/1036/skandal_bank_century_setelah_satu_dekade



Sumber Foto harianterbit.com Ilustrasi skandal BC

Oleh **Taufik Darusman**

Kalau ada yang mengira bahwa apa yang dikenal sebagai skandal Bank Century (BC) sudah selesai, mereka keliru besar. 10 Tahun setelah kasus ini mengemuka, pada 2008, ia kembali menyita perhatian masyarakat luas ketika Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, minggu lalu, mengatakan lembaga antikorupsi itu tengah mengevaluasi peran 10 orang yang disebut dalam dakwaan jaksa terhadap Budi Mulya, Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pada 2014, memutuskan Budi bersama enam orang lainnya bersalah dalam memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada BC. Budi divonis 10 tahun penjara. Ketika Budi naik banding di Pengadilan Tinggi, hakim memperberat hukumannya menjadi 12 tahun. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA), pada 2015, menambah masa hukumannya menjadi 15 tahun.

Di antara 10 orang yang disebut jaksa terdapat nama-nama mantan Wapres Boediono (ketika itu Gubernur BI), Miranda Goeltom (ketika itu Senior Deputy Gubernur BI) dan Siti C. Fadjrijah serta Budi Rochadi, yang bersama Budi ketiga-tiganya menjabat Deputy Gubernur BI. Siti dan Rochadi meninggal dunia beberapa tahun lalu.

Bahwa skandal Rp 6,7 triliun (atau Rp 8 triliun, tergantung pihak mana yang menghitung) hanya melibatkan satu orang saja memang luar biasa. Tapi belum sempat merenungkan kegagalan tersebut, publik sudah harus mencerna kasus-kasus lainnya seperti Hambalang—melibatkan para petinggi Partai Demokrat seperti Anas Urbaningrum dan Nazaruddin—dan belakangan ini, E-KTP. Maka lenyap dari perhatian publik apa yang oleh Wapres Jusuf Kalla disebut sebagai suatu "kasus perampokan".

Kasus ini mungkin nyaris hanyut dan hilang kalau bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), awal bulan ini, memerintahkan KPK untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka dalam kasus ini. Gejala hilang tanpa membekas ini diperkuat oleh pernyataan Situmorang dari KPK, yang menyatakan: "April tahun kemarin kami sudah mengelompokkan kesepuluh orang ini perannya seperti apa." (Kompas 18 April/2018). April kemarin? Luar biasa, itu *kan* sudah satu tahun lalu.

Sesungguhnya, BC, yang ketika itu mengalami kesulitan likuiditas, tidak akan pernah mendapatkan FPJP itu seandainya para pejabat BI memutuskan bahwa bank itu *tidak* perlu diselamatkan. Namun yang terjadi sebaliknya: para pejabat BI justru mengambil kebijakan untuk menyelamatkan BC. Bila tidak, dampak negatifnya akan bersifat sistemik terhadap perbankan dan perekonomian nasional, demikian alur pemikiran para pejabat BI. Karena itu, mengucurlah triliunan rupiah dari kas negara. Dalam auditnya, BPK mempertanyakan keputusan BI untuk mengubah aturan *capital adequacy ratio* dari 8% menjadi cukup positif saja. Semua itu tentunya konsekuensi formal dari hasrat kuat BI untuk menyelamatkan BC. BI bukan saja ingin 'main cantik' tapi juga 'main formal'.

Mungkin misteri terbesar adalah, mengapa perkiraan senula bahwa Rp 1 triliun cukup untuk mem-*bail out* BC kemudian menggelembung secara bertahap menjadi Rp 6.7 triliun, dan akhirnya konon Rp 8 triliun? Ke mana saja dana tersebut mengalir, seperti dibahas dalam diskusi di ILC tersebut?

Singkat kata, kita selama ini terlalu fokus pada masalah teknis, yaitu penyelamatan BC, ketimbang alasan rasional dari tindakan itu sendiri seperti yang dirumuskan BI. Sejujurnya, banyak bankir yang ragu apakah perbankan dan perekonomian nasional memang akan hancur bila BC tidak diselamatkan.

Banyak spekulasi perihal keputusan BI yang kontroversial itu. Ada yang mengatakan bahwa penyelamatan BC dilatarbelakangi hasrat untuk melindungi kepentingan orang-orang penting yang menyimpan dana dalam jumlah besar dalam bank tersebut. Harus diingat, penjaminan LPS hanya terbatas hingga Rp 2 miliar saja sedangkan banyak nasabah penting konon menyimpan dana yang jauh melebihi angka tersebut.

Ada juga yang menduga bahwa beberapa pihak menyelam sambil minum air dengan *bail out* bank tersebut. Insinuasinya yang paling dahsyat datang dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) minggu lalu, Fuad malahan

bertanya, apakah penunjukan Boediono sebagai wapres merupakan bentuk gratifikasi dari SBY?

Di tengah meningkatnya spekulasi yang kian hari bertambah liar, sebaiknya KPK tampil dan menuntaskan kasus ini. Untuk sementara, banyak yang memperkirakan Boediono akan 'lolos' dan menikmati hari tuanya dengan aman dan sentosa: KPK sudah memutuskan bahwa kebijakan tidak bisa dikriminalisasi. Dan keputusan untuk mem-*bail out* BC merupakan suatu kebijakan yang diambil bersama oleh para pejabat BI.

Penulis adalah wartawan senior yang bermukim di Jakarta.

Sumber Berita:Berbagai sumber